

BAB V

KESIMPULAN

Konflik Israel Palestina yang telah terjadi selama berabad-abad mengakibatkan banyak kerugian bagi warga Palestina, seperti hilangnya tempat tinggal, keluarga bahkan hak asasi manusia. Israel yang ingin mengusir Palestina dari tanah mereka sendiri dengan alasan bahwa tanah yang ditempati oleh Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Yahudi sehingga Israel merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dan melakukan pengusiran secara paksa kepada warga Palestina.

Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel adalah melakukan penyerangan terhadap kapal bantuan Mavi Marmara, yang mana kapal tersebut berisi relawan dan bantuan yang akan di kirim ke Palestina. Namun sebelum bantuan disalurkan, Israel menghadang kapal dengan tembakan membabi buta dan memperlakukan para relawan dengan semena-mena sedangkan para relawan tidak membawa senjata. Tindakan Israel tersebut tentu mendapat kecaman dari dunia internasional, berbagai cara dilakukan untuk menghentikan blokade Israel terhadap Gaza, untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel atau untuk membebaskan semua relawan yang menjadi tahanan Israel.

Indonesia yang merupakan salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib menjunjung tinggi isi Deklarasi Hak Asasi Manusia. Untuk menunjukkan komitmen Indonesia tersebut, sesuai dengan politik luar negeri yang bebas aktif Indonesia berperan aktif dalam

penghentian segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Hal itu, diwujudkan dalam peran Indonesia di berbagai forum multilateral salah satunya seperti Dewan HAM PBB. Di Dewan HAM PBB, Indonesia berhasil mendesak dikeluarkannya sesi berupa *urgent debate* yang diadakan pada Selasa, 1-2 Juni 2010 ditengah-tengah Persidangan Sesi ke-14 Dewan HAM PBB. Sesi *urgent debate* Sidang Dewan HAM PBB pada tanggal 2 Juni 2010, juga telah mengesahkan resolusi A/HRC/14/1 mengenai *The Grave Attacks by Israeli Forces against the Humanitarian Boat Convoy* yang berisi pembentukan (*International Fact-Finding Mission/IFFM*) atau misi pencari fakta independen untuk menyelidiki kasus Mavi Marmara.

Selain itu, melalui Tim Pengacara Muslim (TPM) Indonesia juga berupaya untuk membawa kasus Mavi Marmara ke Dewan HAM PBB hingga Mahkamah Internasional. Dalam laporan pengaduannya, TPM diterima Amnesty International melalui Kantor Perwakilan Eropa di Brussel, Belgia pada 20 September 2010. Laporan TPM tersebut dijadikan salah satu referensi oleh Amnesty International untuk menekan Israel agar bertanggung jawab dalam penyerangan Mavi Marmara. Pada tanggal 27 September 2010 TPM ikut serta dalam persidangan membahas kasus Freedom Flotilla yang berlangsung di markas Dewan HAM PBB Jenewa, Swiss. Untuk menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel, TPM membawa bukti berupa hasil laboratorium yang memperlihatkan adanya kandungan arsenik dalam tubuh para relawan yang disandera Israel dan adanya temuan tentang peluru yang bersarang di salah satu relawan

Bukti ini telah membuat Dewan HAM PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 30 September 2010 yang menyatakan Israel telah melanggar hak asasi manusia secara serius dan berencana. Sehingga dengan adanya resolusi ini maka Israel diwajibkan untuk mengganti kerugian para relawan dan menghentikan blokade Gaza.

Dukungan Indonesia terhadap Paletina juga ditunjukkan dengan memberikan bantuan dalam bidang kesehatan dan bidang keuangan. Indonesia membantu pendirian pusat informasi infeksi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan bantuan kemanusiaan. Dalam bidang keuangan, Indonesia merupakan negara pertama yang menyalurkan bantuan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk memenuhi kekurangan pasokan sandang, pangan serta papan di Palestina selama agresi yang dilakukan oleh Israel.

Dengan adanya berbagai cara untuk menghentikan blokade Gaza oleh Israel, diharapkan kemerdekaan warga Palestina dapat segera terwujud dan segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dapat dihentikan karena pelanggaran yang dilakukan Israel telah menyebabkan penderitaan luar biasa bagi warga Palestina, seperti kehilangan kebebasan beribadah, kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga kebebasan untuk memakai fasilitas umum yang tersedia